



**Judul** : Program Nametag Tak Penting, Vaksinasi Juga Banyak Masalah  
**Tanggal** : Minggu, 18 Juni 2023  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 6

Komisi IV Soroti Kebijakan PKH Kementerian

# **Program Nametag Tak Penting, Vaksinasi Juga Banyak Masalah**

**Ketua Komisi IV DPR Sudin menyoroti tingginya serangan virus yang menyerang hewan ternak. Namun, program vaksinasi pada hewan yang dilakukan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Ditjen PKH Kementerian) justru diduga bermasalah.**

SUDIN menegaskan, Komisi IV DPR telah memberikan dukungan terhadap setiap upaya peningkatan produksi pangan dan antisipasi serangan penyakit terhadap hewan ternak. Hal itu melalui pembelian vaksin untuk memperkebal hewan ternak dari serangan virus.

"Itu kalau beli vaksinnya benar. Ini kan PKH juga banyak masalah pengadaan vaksin ini," kata Sudin.

Sudin sejak September 2022 telah memperingatkan adanya dugaan persoalan pengadaan vaksin untuk Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Ketua DPD PDIP Lampung ini juga menyoroti program yang digagas PKH, Kementerian untuk tahun 2024, yang tidak memberi dampak pada upaya peningkatan populasi hewan ternak.

Salah satunya, pengadaan 'nametag' pada hewan ternak untuk pendataan populasi hewan ternak.

"Nametag ini tidak diperlukan juga kok. Kita lihat hari ini. Jadi, tidak ada korelasi anggaran dengan produksi," katanya.

Sementara, anggota Komisi IV DPR Yohanis Fransiskus Lema menekankan pentingnya penambahan anggaran untuk pencegahan dan pengendalian penyakit yang menyerang hewan ternak terutama *zoonosis*.

"Jadi rabies, *African Swine Fever* (ASF/Demam Babi Afrika) dan seterusnya," kata priya yang akrab disapa Ansi ini.

Berikutnya, sambung dia, terkait asuransi usaha ternak yang oleh Ditjen PKH Kementerian di-

penandaan hewan ternak atau *nametag* yang terlalu besar namun tidak terlalu penting.

"Kami dengan ada anggaran untuk penandaan ternak sapi yang konon kabarnya satu ekor itu Rp 20 ribu. Semacam nametag untuk konteks NTT itu 30 ribu (sapi). Kami kalkulasi Rp 20 ribu kali 30 ribu (sapi), anggarannya sekitar 600 jutaan. Apakah mungkin itu bisa dikohversikan?" ujarnya.

Selain itu, Ansi juga meminta agar Ditjen PKH Kementerian mengubah *mindset*-nya bahwa program yang dicanangkan tidak hanya sebatas pada pengadaan ternak. Bangun perspektif bahwa kesehatan hewan ini penting.

"Jadi bukan terus menerus kita pengadaan ternak, tetapi vaksin, vitamininya, dokter hewannya, ini menurut saya perlu kita perhatikan," tambahnya.

Sementara, anggota Komisi IV DPR Alfin Mus mengingatkan Ditjen PKH Kementerian untuk mengawasi penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) yang menyerang sapi. Penyakit ini memiliki tingkat kematian tinggi pada anak sapi sementara jika menyerang sapi dewasa sudah tidak pantas untuk dikonsumsi.

"Apalagi kita beberapa hari ini akan menghadapi Hari Raya (Idul Adha). Tentu orang mau bercurban tapi pastinya hewan yang sehat. Saya harap ini jadi atensi," ujarnya.

Ditjen PKH Kementerian Nasrullah menegaskan, Pemerintah telah melakukan upaya pencegahan penyebaran penyakit